

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA MODAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Drs.H.Dani Rachman, M.Si.

Metty Aryanti, S.Ak.

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh kinerja keuangan daerah dan alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomipadaPemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2008-2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kinerja keuangan daerahberpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan uji t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,890 > 2,364$ dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,023. Kemudian alokasi belanja modalsecara parsial tidakberpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $0,431 < 2,364$ dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,680. Hasil uji F yaitu hasil F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $6,076 > 4,74$, dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,030. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan kinerja keuangan daerah dan alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadappertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : kinerja keuangan daerah, alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

1. Pendahuluan

a. Latar belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah mengalami perubahan bentuk pemerintahan yang tersentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, lalu UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Berdasarkan PP No 105 Pasal 8, disebutkan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio (Halim, 2013: L-2).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas (rasio keserasian), debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan (Halim, 2013: L-5). Dan berdasarkan penelitian Sularso (2011) untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu: derajat desentralisasi,

ketergantungan keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna meningkatkan kinerja keuangan daerah maka Pemerintah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan sebaik – baiknya. Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53, adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik selama pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi serta kemiskinan yang besar. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi yang menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh sektor perekonomian, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU Nomer No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang stabil akan berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Instansi, yang akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan Instansi. Seperti pada contoh penelitian yang dilakukan oleh Kurni Adi Suwandi dan Afrizal Tahar (2015) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja ,Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta) bahwa Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Kinerja Keuangan dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan, serta alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota D.I Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun penulis di lapangan, bahwa kinerja keuangan daerah yang belum optimal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya alokasi belanja modal serta pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik dan Restu Agusti (2015) menemukan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Havid Sularso dan Yanuar E Restianto (2011) menemukan hasil penelitian bahwa alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pada Pemerintah Kabupaten Bandung juga perlu dilakukan penelitian apakah Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Kinerja Keuangan dengan menggunakan derajat desentralisasi dan alokasi belanja modal sebagai variabel interveningnya, atau kinerja keuangan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas serta pernyataan yang di ungkapkan oleh para ahli dan didukung pula dengan penelitian terdahulu, maka penulis menjadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis mengambil judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”**.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2008–2017.
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2008–2017.

3. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2008–2017.

c. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Bale Bandung dan untuk mengetahui perkembangan serta pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2008 – 2017.
2. Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2008 – 2017.
3. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2008 – 2017.

d. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini yaitu antara lain :

1. Bagi Instansi
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang berguna dan menjadi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan lembaga pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.
2. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.
3. Bagi Peneliti
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Bale Bandung. Dan menambah wawasan tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan latihan teknis untuk mengaplikasikan pemahaman terhadap teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek atau aplikasi lapangan.
4. Bagi Pihak Lainnya
Dapat dijadikan referensi yang bermanfaat bagi pihak lainnya yang membutuhkan untuk menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian dengan judul dan penelitian yang sejenis.

II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Pengertian Akuntansi

Adapun pengertian akuntansi menurut Langenderfer dalam buku Mardiasmo yang berjudul Akuntansi Sektor Publik (2009:160), adalah:

“Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai sumber daya optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi”.

2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Adapun pengertian akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2009:14) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, menjelaskan bahwa :

“Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen, maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja”.

3. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Adapun pengertian laporan keuangan daerah menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

4. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2013) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, mengemukakan bahwa :“Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”.

Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio aktivitas (keserasian), debt service coverage ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SILPA.

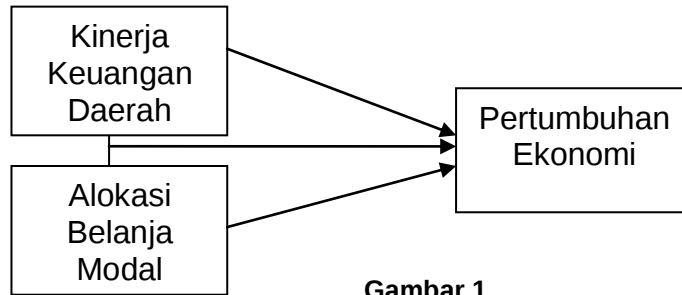
5. Pengertian Alokasi Belanja Modal

Menurut Badrudin dalam bukunya yang berjudul Ekonomika Otonomi Daerah (2012:61-62) mengemukakan bahwa:“Belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintah yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

6. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno dalam bukunya yang berjudul Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi 3 (2011:331) menyatakan bahwa: “Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya.

7. Paradigma Pemikiran



Gambar 1
Paradigma Penelitian

8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diduga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- b. Diduga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- c. Diduga secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

III Objek dan Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, seorang peneliti harus dapat menentukan objek penelitiannya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis (2012:13) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut:

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu tergantung sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Adapun objek dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah kinerja keuangan daerah, alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung. Pemilihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada pertimbangan bahwa BKD Kabupaten Bandung mempunyai data yang lengkap untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono, (2012:3) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, mendefinisikan bahwa: “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data numeric (angka).

Sedangkan operasionalisasi variabel merupakan penarikan batasan yang lebih menjelaskan suatu variabel yang sudah didefinisikan konsepnya yang digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang akan diteliti juga merupakan definisi mengenai variabel-variabel penelitian yang diambil dari teori kepustakaan dan merupakan teori penghubung dari judul yang akan diteliti, sebagai berikut :

Tabel 1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel bebas (X_1): Kinerja Keuangan Daerah	Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio aktivitas (keserasian) (Halim, 2013)	1. Mengetahui kinerja keuangan daerah dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $RDD = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Variabel bebas (X_2): Alokasi Belanja Modal	Alokasi Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi sumber manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: 1. Belanja tanah, 2. Belanja peralatan dan mesin, 3. Belanja modal gedung dan bangunan, 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5. Belanja aset tetap lainnya, 6. Belanja aset lainnya. (Abdul Halim, 2009)	1. Belanja tanah, 2. Belanja peralatan dan mesin, 3. Belanja modal gedung dan bangunan, 4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, 5. Belanja aset tetap lainnya, 6. Belanja aset lainnya. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja dalam APBN}} \times 100\%$	Rasio
Variabel terikat (Y): Pertumbuhan Ekonomi	Kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. (Sukirno, 2011)	1. Bersumber dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$	Rasio

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi : Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Begitupun seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2011:275) dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” yang mengemukakan bahwa:

“Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

Bila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (*Return On Asset*)

X₁ = Variabel bebas (*Total Asset Turnover*)

X₂ = Variabel bebas (*Net Profit Margin*)

a = Bilangan berkonstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X₁, X₂ = 0

b₁, b₂ = Koefisien regresi

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel yang diteliti, baik secara parsial antara variabel X₁ dengan Y, X₂ dengan Y, maupun korelasi ganda antara variabel X₁ dan X₂ dengan Y.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, Kuantitatif Kualitatif dan R&D mendefinisikan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H₀) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H₀ tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh perputaran persediaan dan perputaran piutang terhadap profitabilitas secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}.

Setelah menghitung nilai t_{hitung}, selanjutnya bandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan kriteria pengujian berikut:

1. Jika t_{hitung} > t_{tabel} pada α = 5% maka H₀ ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).

2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

Kemudian membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

2. Uji Signifikansi Simultan (hasil Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah perputaran persediaan dan perputaran piutang secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Setelah itu, gunakan kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Linier Berganda

Tabel 2

Hasil Analisis Linier Berganda

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.108	6.723		6.114	.000
X1_Kinerja Keuangan Daerah	.143	.050	.741	2.890	.023
X2_Alokasi Belanja Modal	.018	.043	.110	.431	.680

a. Dependent Variable: Y_Pertumbuhan Ekonomi

- a. Konstanta sebesar 41,108
Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Kinerja Keuangan Daerah (X_1) Dan Alokasi Belanja Modal (X_2) nilainya 0, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah 41,108.
- b. Koefisien regresi Kinerja Keuangan Daerah (X_1) sebesar 0,143
Hal ini menunjukan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Kinerja Keuangan Daerah (X_1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,143 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien regresi Alokasi Belanja Modal (X_2) sebesar 0,018
Hal ini menunjukan adanya indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Alokasi Belanja Modal (X_2) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,018 dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 3
**Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial Kinerja Keuangan Daerah (X₁) Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (Y)**
Correlations

Control Variables			Kinerja Keuangan	Pertumbuhan Ekonomi
Alokasi Belanja Modal	Kinerja Keuangan	Correlation	1.000	.738
		Significance (2-tailed)	.	.023
		df	0	7
	Pertumbuhan Ekonomi	Correlation	.738	1.000
		Significance (2-tailed)	.023	.
		df	7	0

Tabel 4
**Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial Alokasi Belanja Modal (X₂) Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (Y)**
Correlations

Control Variables			Alokasi Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja Keuangan	Alokasi Belanja Modal	Correlation	1.000	.161
		Significance (2-tailed)	.	.680
		Df	0	7
	Pertumbuhan Ekonomi	Correlation	.161	1.000
		Significance (2-tailed)	.680	.
		Df	7	0

Tabel 5
Hasil Uji Korelasi Ganda (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.790 ^a	.625	.578	2.84350

a. Predictors: (Constant), X2_Alokasi Belanja Modal, X1_Kinerja Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Y_Pertumbuhan Ekonomi

- Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diatas, menunjukkan bahwa :
- Besarnya koefisien korelasi adalah $-1 \leq R \leq 1$ dan hasil yang diperoleh dari nilai korelasi Kinerja Keuangan Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar 0,738 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, artinya jika Kinerja Keuangan Daerah naik maka Pertumbuhan Ekonomi pun akan mengalami kenaikan. Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,738. Jika melihat interval koefisien angka 0,738 berada diantara 0,60-0,799 yang berarti variabel X1 mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel Y.
 - Besarnya koefisien korelasi adalah $-1 \leq R \leq 1$ dan hasil yang diperoleh dari nilai korelasi Kinerja Keuangan Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar 0,161 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,161. Jika melihat interval koefisien angka 0,161 berada diantara 0,00-0,199 yang berarti variabel X2 mempunyai hubungan yang sangat rendah dengan variabel Y.
 - Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan adalah searah, artinya jika Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal naik, maka Pertumbuhan Ekonomi pun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,790 berada di antara 0,60 – 0,799 yang berarti variabel X1 dan X2 memiliki hubungan yang kuat dengan variabel Y.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Uji Korelasi Ganda (R-Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.790 ^a	.625	.578	2.84350

a. Predictors: (Constant), X2_Alokasi Belanja Modal, X1_Kinerja Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Y_Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,625. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,625 (62%). Yang berarti, Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Pada Periode 2008 – 2017 dipengaruhi oleh Kinerja Keuangan Daerah Dan Alokasi Belanja Modal Sebesar 62%.

4. Uji t (Parsial) dan uji F (simultan)
1. Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.108	6.723		6.114	.000
X1_Kinerja Keuangan	.143	.050	.741	2.890	.023
X2_Alokasi Belanja Modal	.018	.043	.110	.431	.680

a. Dependent Variable: Y_Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel diatas maka:

- Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai thitung untuk variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sebesar 2,890 dengan signifikansi 0,023 sedangkan ttabel dengan dk 7 ($n-3 = 10-3$) adalah 2,364 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika thitung lebih besar daripada ttabel ($2,890 > 2,364$) dan taraf signifikansi X1 (0,023) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat diputuskan jika Kinerja Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2008 - 2017.
- Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai thitung untuk variabel bebas Alokasi Belanja Modal (X2) adalah sebesar 0,431 dengan signifikansi 0,680 sedangkan ttabel dengan dk 7 ($n-3 = 10-3$) adalah dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika thitung lebih kecil daripada ttabel ($0,431 < 2,364$) dan taraf signifikansi X2 (0,680) lebih Besar daripada 0,05 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian dapat diputuskan jika Alokasi Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2008 - 2017.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 8
**Hasil Uji F Kinerja Keuangan Daerah (X1) dan Alokasi Belanja Modal (X2) Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (Y)**

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109.385	2	54.693	6.076	.030 ^a
	Residual	63.015	7	9.002		
	Total	172.400	9			

a. Predictors: (Constant), X2_Alokasi Belanja Modal, X1_Kinerja Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Y_Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 6,076, sedangkan F-tabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 7 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,030, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 4,74 . Karena F-hitung > F-tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari Kinerja Keuangan Daerah (X₁) Dan Alokasi Belanja Modal (X₂) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Dari tabel ANOVA diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-f sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Kinerja Keuangan Daerah (X₁) dan Alokasi Belanja Modal (X₂) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

V Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan yang telah peneliti bahas sebelumnya, mengenai pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008-2017, maka pada bagian akhir dalam penelitian ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis uji pengaruh parsial antara Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan variabel Kinerja Keuangan Daerah mempunyai hubungan positif yang kuat dan signifikan, hal ini berarti Kinerja Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2008 - 2017. Berdasarkan hasil observasi di tempat penelitian bahwa Kinerja Keuangan Daerah selama periode pengamatan mengalami fluktuatif tetapi cenderung meningkat signifikan, dan Pertumbuhan Ekonomi pun mengalami fluktuatif tetapi cenderung meningkat signifikan.
2. Variabel Alokasi Belanja Modal mempunyai hubungan tidak searah yang lemah dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2008 - 2017 hal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji parsial variabel Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Secara simultan, variabel bebas Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan variabel terikat. Pengaruh yang signifikan Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung, bahwa secara bersama-sama dipengaruhi oleh Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal, sehingga Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal memberikan pengaruh yang kuat terhadap Pertumbuhan Ekonomi walaupun secara sendiri-sendiri menunjukkan hasil bahwa Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh positif, kuat dan signifikan dan Alokasi Belanja Modal berpengaruh negatif, sedang dan signifikan.

b. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Capaian positif dari Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan cara menggali dan memanfaatkan dengan baik sumber sumber yang dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah itu sendiri. Dalam upaya peningkatan Kinerja Keuangan Daerah ini tentu sangat tergantung pada peningkatan atas nilai yang ada pada Kinerja Keuangan Daerah itu sendiri seperti halnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pengelolaan Aset Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain Lain Pendapatan Asli

- Daerah Yang Sah. Selain itu, peningkatan Kinerja Keuangan Daerah juga dapat menunjukan tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat baik.
2. Alokasi Belanja Modal memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diharapkan agar kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat memanfaatkan secara efektif sumber-sumber yang dapat meningkatkan Alokasi Belanja Modal karena peningkatan perekonomian masyarakat lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah. Selain itu juga pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga diharapkan dapat memaksimalkan Alokasi Belanja Modal salah satunya dengan penghematan anggaran agar Alokasi Belanja Modal lebih besar dan dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah.
 3. Diharapkan kedepannya Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus lebih meningkat lagi, agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, maka harus ditingkatkan sumber-sumber yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka menciptakan pemanfaatan perekonomian yang lebih baik lagi.
 4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih membahas secara menyeluruh dan mendalam dalam pembahasan mengenai teori-teori dan pengolahan data dari sumber datanya secara langsung dan diharapkan dapat memperluas dan memperbanyak sampel seperti Pemerinta Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan memperbaharui periode pengamatan serta menambah variabel-variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual**. Bandung : Alfabeta.
- Abdul Halim. 2010. **Akuntansi Daerah Sektor Publik**. Jakarta : Salemba Empat.
- Abd. Rachim. 2015. **Barometer Keuangan Negara/Daerah**. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Anasmen. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006. Tesis. Universitas Indonesia.
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin. 2004. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A dan Kusufi, M. S. 2013. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta : Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2010. **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga.
- Kurniawan, D. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dalam era Otonomi Daerah. Tesis. Universitas Andalas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Pertama Permendagri No 13 Tahun 2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006).

Prihastuti, Asepma Hygi, Taufeni Taufik dan Restu Agusti. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. Jurnal, Universitas Riau.

Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Saragih. 2006. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.

Suwandi, Kurni Adi dan Afrizal Tahar. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. E-Jurnal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.